

TERM OF REFERENCE POSITION PAPERS

REFLEKSI EMPAT TAHUN PERDAMAIAN ACEH

Latar Belakang

MoU antara pemerintah RI dan GAM merupakan pintu gerbang bagi perdamaian Aceh setelah konflik berkepanjangan selama 32 tahun . Dampak konflik tersebut hancurnya struktur sosial Aceh yang secara fundamental. Momentum tersebut seharusnya membawa rasa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh dan korban konflik khususnya. Namun sejauh ini, realitas proses perdamaian mengalami beberapa titik kelemahan yang bisa berdampak pada munculnya titik jenuh yang berujung terulangnya kembali konflik tersebut. Tentunya, situasi ini tidak seorangpun mau mengharapkannya. Oleh karena itu, perlu ada perhatian semua orang dalam merespon berbagai kebijakan yang sudah dikeluarkan dapat digunakan secara maksimal dalam bentuk implementasinya. Sebagai contoh, UU No 11/2006 sebagai bentuk jabaran dari kesepakatan politik MoU Helsinki memiliki nilai dan substansi politik yang sangat besar untuk digunakan oleh masyarakat dan Pemerintah Aceh dalam menata kembali Pembangunan Aceh, tetapi kemajuan implementasi UU No.11/2006 ini belum memberikan dampak yang konstruktif bagi menjawab keberlanjutan perdamaian dan Pembangunan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Sejauh ini, UU No.11/2006 telah berjalan hampir tiga tahun lebih, dan 15 Agustus 2009 ini merupakan momen paling penting perdamaian Aceh yaitu empat tahun MoU Helsinki. Tentunya, momentum tersebut harus menjadi masa yang tepat bagi kita untuk melakukan refleksi sejauhmana implementasi MoU Helsinki dan UU No.11 2006 memiliki implikasi politik pada keberlanjutan perdamaian dan Pembangunan Aceh kedepan. Qanun sebagai aturan daerah yang dijabarkan dari UU No.11/2006 merupakan regulasi penting yang seharusnya bisa mengatur berbagai kebutuhan pembangunan dalam segala sektor, tetapi sejauh ini substansi politik dalam kandungan aturan/qanun tersebut belum memberikan nuansa perubahan bagi tata pemerintahan dan Pembangunan Aceh. Selama ini yang selalu keluar dari berbagai statement pemangku kepentingan di badan legislatif dan eksekutif tentang kesulitan dan masalah yang dihadapi oleh mereka dalam berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat, selalu saja Pemerintah Pusat menjadi sasaran justifikasi tentang keterlambatan Pembangunan Aceh. Jika kita lihat dinamika ini, maka sangat kita sayangkan keberadaan mereka belum mampu melakukan negosiasi dan komunikasi politik dengan berbagai pihak dalam memuluskan implementasi UU No.11 2006 sehingga bisa melahirkan rel bagi pembangunan Aceh yang berkelanjutan untuk masa 50 – 100 tahun kedepan.

Untuk merefleksikan empat tahun perdamaian dan implementasi UU No.11 2006, maka ACSTF mengambil inisiatif untuk mengkaji implementasi perdamaian “MoU helsinki dan

UU No.11 2006” dengan melakukan beberapa pendekatan kajian, antara lain : survey kecil, focus group discussion, dan publikasi. Produk kajian ini akan diterbitkan dalam bentuk position paper yang hasilnya bisa digunakan oleh banyak pihak sebagai informasi atau basis argumentasi mereka. Dalam pembuatan position papers ini melibatkan komponen masyarakat sipil, guna mendapatkan masukan-masukan yang positif.

Justifikasi

- a. Implementasi MoU Helsinki dan UU No.11 2006.
- b. Sinkronisasi pemahaman dalam implementasi antar badan pemerintahan; pemerintah pusat, DPR RI, pemerintah Aceh dan DPRA yang masih jauh dari perspektif perdamaian dan pembangunan Aceh yang berkelanjutan.
- c. Media untuk menerima masukan masyarakat dalam mengefektifkan implementasi UU No.11 2006 masih terbatas.
- d. Komitmen dan konsistensi dalam menggunakan semangat perdamaian dalam implementasi UU No.11 2006 mulai kabur di tingkat DPRA dan Pemerintah Aceh.

Tujuan

Mengkaji implementasi MoU Helsinki dan UU.No 11 2006 sebagai basis hukum dalam menjamin keberlanjutan perdamaian dan Pembangunan Aceh yang berkelanjutan.

Jadwal

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 24 – Juli 2009 di ruangan rapat Prof Isa Sualaiman ACSTF. Jam : 14.30. diharapkan kehadiran dari peserta FGD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Kontak Person :

Popon : 085260585866

Peserta :

Peserta yang hadir dalam acara ini adalah perwakilan dari komponen masyarakat sipil : aktivis, akademisi, ulama, Pemerintah Aceh, perwakilan anggota dewan, mahasiswa, dan perwakilan BRA.

Penutup

Demikian rencana focus group discusstion sehari yang akan kami laksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih.